

BAB I**PENDAHULUAN****1. 1. Latar Belakang**

Pada 8 Juli 2016, Korea Selatan dengan Amerika Serikat bersepakat untuk menempatkan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Semenanjung Korea (Panda, 2016). THAAD merupakan sistem senjata pertahanan anti-rudal balistik yang berfungsi sebagai penangkal serangan rudal jarak pendek dan menengah. Sistem senjata pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat ini kemudian telah tersebar di beberapa negara termasuk Korea Selatan. Di bawah administrasi Park Geun Hye, Korea Selatan memutuskan untuk menempatkan THAAD di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di Kabupaten Seongju, yang terletak sekitar 200 kilometer tenggara Seoul (ISDP, 2017).

Tujuan penempatan THAAD bagi Korea Selatan adalah sebagai bentuk upaya pertahanan keamanan dari ancaman serangan Korea Utara (ISDP, 2017). Uji coba nuklir dan beberapa uji coba rudal balistik, termasuk peluncuran rudal balistik jarak menengah yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman serius yang dilakukan Korea Utara terhadap keamanan dan stabilitas Republik Korea Selatan dan seluruh wilayah Asia-Pasifik (USFK, 2016). Melalui kesepakatan dan konsultasi yang dilakukan Korea Selatan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan kemudian memutuskan untuk menempatkan THAAD yang kemudian akan dioperasikan oleh *US Forces in Korea* (USFK) di wilayah Korea Selatan. Korea Selatan mengklaim bahwa upaya yang dilakukannya ini murni sebagai

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

upaya pertahanan. Adanya langkah pertahanan ini, negara dapat memastikan keamanan rakyat Korea Selatan, serta untuk melindungi pasukan militer aliansi dari senjata pemusnah massal dan ancaman rudal balistik Korea Utara (USFK, 2016).

Namun, upaya murni pertahanan sebagaimana yang diklaim Korea Selatan mendapat respon negatif dan penentangan dari beberapa pihak salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok menunjukkan ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah Korea Selatan sejak diumumkannya bahwa kedua negara, Korea Selatan dan Amerika Serikat, tengah bersepakat untuk melangsungkan konsultasi dan diskusi terkait penempatan THAAD. Penentangan Tiongkok semakin meningkat ketika Korea Selatan dan Amerika Serikat secara resmi memutuskan untuk menempatkan THAAD di Korea Selatan dan juga ketika Korea Selatan telah resmi menentukan lokasi situs sistem senjata pertahanan tersebut akan ditempatkan (Swaine, 2017). Tiongkok menyatakan bahwa upaya Korea Selatan dan kerjasamanya dengan Amerika Serikat terkait penempatan sistem THAAD ini sama sekali tidak dapat membantu mencapai tujuan denuklirisasi ataupun menjaga perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea. Penempatan THAAD ini justru bertentangan dengan upaya semua pihak untuk menyelesaikan masalah melalui diplomasi dialog dan konsultasi. Keputusan ini dikhawatirkan justru akan mengancam kepentingan keamanan strategis negara-negara regional termasuk Tiongkok dan keseimbangan strategis regional (Swaine, 2017). Beberapa hal yang menjadi perhatian dan kekhawatiran Tiongkok adalah bahwa dengan adanya hubungan kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui sistem THAAD ini,

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

keamanan nasional Tiongkok akan terancam. Tiongkok mengkhawatirkan THAAD dapat digunakan untuk menyabotase dan memata-matai wilayahnya. Selain itu, melalui penyebaran THAAD, Korea Selatan akan memiliki komitmen jangka panjang dengan Amerika Serikat, sehingga memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Timur (ISDP, 2017).

Tiongkok kemudian memutuskan untuk melakukan kebijakan pelarangan berbagai kultur budaya Korea Selatan sebagai penunjukan bentuk protesnya atas kebijakan Korea Selatan termasuk salah satu kekuatan budaya besar yang dimiliki oleh Korea Selatan yakni *Hallyu* atau *Korean Wave*. Pelarangan kultur budaya ini termasuk dengan dilarangnya penayangan berbagai konten budaya Korea Selatan seperti penampilan artis Korea Selatan dan penayangan drama Korea Selatan. Lebih jauh, pemerintah Tiongkok melarang diadakannya konser musik seniman Korea Selatan, acara TV dan film produksi Korea Selatan juga telah diblokir, dan para aktor digantikan oleh bintang-bintang nasional Tiongkok dalam berbagai kampanye iklan. Menurut laporan berbagai media Korea Selatan bahwa tidak ada penghibur atau artis Korea Selatan yang memperoleh izin pemerintah Tiongkok untuk tampil di negara tersebut sejak bulan Oktober 2016 (Smith, 2016). Berlanjut pada bulan Februari 2017, disampaikan oleh Kementrian Luar Negeri Korea Selatan bahwa terdapat pelarangan peredaran kosmetik Korea Selatan di Tiongkok dan dilaporkan bahwa pada bulan Januari 2017, dua seniman klasik Korea Selatan, penyanyi sopranos Sumi Jo dan pianis Kwun-woo Paik, mendapatkan penolakan visa pertunjukan untuk tampil di Tiongkok tanpa ada penjelasan yang jelas (Jozuka & Han, 2017).

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah mengapa Tiongkok menjadikan kebijakan pelarangan budaya Korea Selatan sebagai respon atas penempatan THAAD oleh Korea Selatan?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan Tiongkok untuk memberikan respon kebijakan pada aspek budaya yakni pelarangan kultur Korea Selatan, terhadap persoalan penempatan THAAD oleh Korea Selatan.

1. 4. Tinjauan Pustaka

Untuk memahami lebih lanjut terkait penolakan Tiongkok, penulis kemudian berupaya mengelaborasi fenomena tersebut melalui hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait respon Tiongkok terhadap THAAD. Watts IV (2018) menemukan bahwa Tiongkok menentang penempatan THAAD dengan alasan, pertama Tiongkok mengklaim bahwa THAAD melebihi kebutuhan keamanan Korea Selatan dan akan memicu perlombaan senjata di Semenanjung Korea. Kedua, Tiongkok mengklaim bahwa sistem radar yang terdapat dalam THAAD akan mengancam kekuatan persenjataan pencegah nuklir Tiongkok (*China's nuclear-deterrent forces*) dan mengganggu keseimbangan strategis. Ketiga, penerapan sis-

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tem pertahanan balistik-rudal yang canggih asal Amerika Serikat di Korea akan memperkuat dan membentuk kembali aliansi Amerika Serikat di Asia Timur Laut.

Swaine (2017), lebih menekankan pada penentangan Tiongkok terhadap penempatan THAAD di Korea Selatan karena adanya upaya strategis AS di balik kesepakatan tersebut. Sistem radar *X-band* THAAD yang canggih, digunakan Amerika Serikat untuk mencari informasi militer Tiongkok. Tiongkok juga beranggapan hubungan kerjasama AS-Korea Selatan ini menjadi upaya strategis AS dalam memberikan tekanan dan sebagai bentuk perlawanannya kepada Tiongkok. Sejalan dengan Swaine (2017), Wu (2016) juga Li & De Lima (2016) menjelaskan bahwa penempatan THAAD menjadi sebuah hambatan bagi Tiongkok dalam mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mengancam keamanan di Semenanjung Korea.

Meick & Salidjanova (2017), menjelaskan alasan kekhawatiran Tiongkok terhadap penempatan THAAD oleh Korea Selatan dan bentuk-bentuk tindakan perlawanan Tiongkok kepada Korea Selatan. Terdapat empat hal yang menjadi kekhawatiran Tiongkok terhadap THAAD, pengaruh radar X-band THAAD terhadap sistem pencegahan nuklir Tiongkok, THAAD dianggap justru ditujukan kepada Tiongkok karena sejatinya THAAD tidak mampu memberikan pertahanan maksimal atas serangan Korea Utara, THAAD dapat menimbulkan ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan dapat menimbulkan perlombaan senjata di kawasan, dan THAAD diklaim dapat membatasi kekuatan Tiongkok di kawasan. Sebagai bentuk penentangannya, Tiongkok kemudian memberlakukan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi dengan memblokir akses pasar barang dan jasa

Korea Selatan di berbagai sektor, yakni pada industri hiburan, produk-produk konsumen, dan bidang pariwisata yang cukup efektif memberikan dampak pada penurunan pendapatan ekonomi Korea Selatan.

Berdasarkan pengelaborasi dari peneliti-peneliti sebelumnya terkait respon Tiongkok terhadap THAAD, penulis kemudian menetapkan untuk melakukan penelitian pada alasan dijadikannya kebijakan pelarangan budaya Korea Selatan sebagai sebuah sanksi oleh Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan. Penulis berupaya untuk menjelaskan korelasi kebijakan Tiongkok dalam merespon penempatan THAAD oleh Korea Selatan sebagai bentuk peningkatan kapabilitas militer mereka, sehingga Tiongkok memutuskan untuk memberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan aspek relasi sosio-kultural Tiongkok-Korea Selatan.

1. 5. Kerangka Berpikir

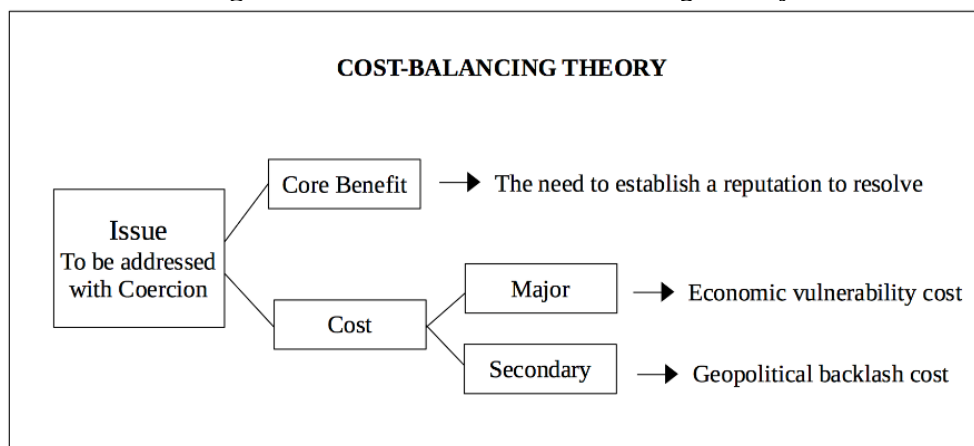
Untuk menganalisis apa yang menjadi alasan pemilihan tindakan pelarangan kultur Korea Selatan oleh Tiongkok sebagai respon tegas atas penentangan kebijakan penempatan THAAD Korea Selatan, penulis menggunakan “*Cost Balancing Theory*” yang dikemukakan oleh Ketian Zhang (2018) sebagai dasar pemikiran perilaku suatu negara dalam melancarkan *coercion* (koersi) atau paksaan kepada pihak lawan sebagai suatu kebijakan luar negeri dalam merespon isu-isu yang mengancam keamanan nasionalnya. Lebih lanjut, penulis juga menjabarkan terkait pemikiran rasional dan taktik strategis Tiongkok dalam memilih

untuk melancarkan pelarangan kultur Korea Selatan sebagai bentuk pilihan instrumen koersinya.

1. 5. 1. Cost Balancing Theory

Cost Balancing Theory yang diprakarsai oleh Ketian Zhang (2018) secara sederhana mengonsepan bagaimana suatu negara memberikan pertimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam keputusan penggunaan koersi. Teori ini kemudian menjadi *framework* yang digunakan Zhang untuk menjelaskan alasan atau dasar pemikiran suatu negara dalam memutuskan pilihan kebijakan luar negeri berupa koersi, sebagai respon atas isu yang mengancamnya. Zhang mengonsepan teori ini berdasarkan pada dua rumusan pertanyaan, (1) kapan dan mengapa negara memilih menggunakan koersi daripada *inaction* (diartikan sebagai tidak melakukan koersi), dan (2) jika koersi menjadi pilihan, *tools* koersi apa yang kemudian digunakan, dan mengapa instrumen tersebut.

Bagan I.1 *Framework "Cost-Balancing Theory"*



Sumber: Zhang (2018)

Zhang (2018) menjelaskan bahwa, pertimbangan suatu negara memutuskan penggunaan koersi sebagai respon kebijakan luar negerinya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya manfaat dan kerugian (*cost-benefit*) dari situasi yang mungkin terjadi ketika dilaksanakannya koersi tersebut. Selain memastikan *worth-wise* keputusan penggunaan koersi, teori ini juga menjelaskan pilihan instrumen koersi yang tepat. Konsep *Cost Balancing Theory* menjelaskan, pada suatu isu yang mengancam keamanan nasional negaranya, penggunaan koersi dipertimbangkan dalam tiga hal, manfaat utama (*core benefit*) dan kerugian (*cost*) yang terdiri dari *major cost* dan *secondary cost* dari dilancarkannya kebijakan tersebut (lihat Bagan I.1).

Core benefit dari koersi adalah *the need to establish a reputation for resolve* atau urgensi untuk membangun reputasi sebagai wujud keseriusan dalam upaya penyelesaian atas isu yang hendak diselesaikan. Kebutuhan pembangunan reputasi ini bertujuan untuk membentuk validasi, kredibilitas, serta menunjukkan tekad negara penarget untuk mengambil tindakan tegas atas isu yang mengancam kepentingan keamanan nasionalnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena, ketika suatu negara memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atas suatu isu, terutama isu yang mengancam keamanan nasionalnya, negara tersebut dapat dianggap negara yang lemah, tidak relevan, tidak serius dalam menjaga kepentingan keamanan nasionalnya, sehingga dapat membentuk citra sebagai negara yang tidak perlu untuk dipertimbangkan. Zhang (2018) menjelaskan, membangun reputasi melalui kebijakan koersi, menjadi keuntungan bagi negara penarget untuk memperoleh kesegaran dari lawan dalam dua hal. Pertama, dapat mendorong negara

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

target untuk menghentikan (atau mengubah) perilaku atas permasalahan yang sedang berlangsung. Kedua, mencegah negara target ataupun negara lain agar tidak bersikap semena-mena, serta mempertimbangkan kembali pengambilan tindakan mereka terhadap negara penarget atas isu yang serupa di masa depan (lihat Tabel I.1).

Major cost dari koersi adalah *economic vulnerability cost* atau risiko kerugian ekonomi. Dampak negatif utama yang harus menjadi pertimbangan negara sebelum memutuskan melakukan koersi adalah aspek ekonomi. Hal ini meliputi mempertimbangkan sejauh mana hubungan atau ketergantungan ekonomi antara kedua negara, baik dalam aspek pasar, *supply*, modal, diantara sumber daya lainnya. Negara penarget perlu mempertimbangkan seberapa besar biaya kerugian yang dihasilkan ketika koersi dilangsungkan. Zhang (2018) kemudian menyebutkan, kecil kemungkinannya bagi suatu negara untuk melangsungkan koersi jika dirinya justru lebih bergantung pada negara target atas pasar atau *supply* (lihat Tabel I.1).

Secondary cost meliputi *geopolitical backlash cost*, yakni terkait besar peluang terjadinya serangan balik geopolitik. *Geopolitical backlash cost* adalah kemungkinan terjadinya serangan balik yang dilakukan oleh negara target, akibat dari dilangsungkannya koersi, yang mana bentuk serangan balik tersebut berupa *balancing* atau penyeimbangan oleh negara target sebagai upaya untuk menyamakan kekuatan tindakan koersi tersebut. *Balancing* ini dilakukan dengan cara membentuk atau mengajak dan menggabungkan kekuatan negara aliansi dari negara target tersebut. Dalam beberapa situasi, serangan balasan bisa pula dil-

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

akukan oleh negara target terlebih dahulu, walaupun demikian, kemungkinan terjadinya eskalasi konflik dengan campur tangan negara aliansi tetap relevan. Sehingga, secara ringkas, risiko terjadinya eskalasi perang, masuk dalam perhitungan *geopolitical backlash cost* karena memicu keterlibatan kekuatan negara aliansi (Zhang, 2018). Terutama ketika negara target memiliki kerjasama militer dengan negara aliansi. Untuk menghindari hal tersebut, negara akan cenderung akan menggunakan instrumen koersi non-militer ketimbang instrumen militer ketika peluang terjadinya serangan geopolitik tinggi (lihat Tabel I.2).

Tabel I.1 *Cost Balancing Theory* : Pilihan Melangsungkan Koersi atau Tidak

Establish Reputation Economic Vulnerability	Greater Need	Smaller Need
High	Issue Importance?	No coercion
Low	Coercion	Issue Importance?

Sumber: Zhang (2018)

Tabel I.2 *Cost Balancing Theory*: Pilihan Bentuk Koersi Militer atau Non-Militer

Geopolitical Backlash Cost	High	Non-military coercion
	Low	Military coercion is possible

Sumber: Zhang (2018)

Konsep *Cost Balancing Theory* tersebut, dengan demikian dapat memprediksi pengambilan keputusan koersi berdasarkan tiga kondisi pertimbangan. Pertama, negara akan memilih melangsungkan koersi, ketika *the need to establish a reputation for resolve* tinggi dan *economic vulnerability cost* dinilai rendah. Kondisi kedua, dalam beberapa kasus langka, ketika kedua *the need to establish a reputation for resolve* dan *economic vulnerability cost* sama-sama tinggi, maka negara akan melakukan koersi hanya jika kepentingan isu mendesak. Kondisi ketiga, yakni bahwa, negara akan cenderung lebih memilih instrumen koersi non-militer, ketika peluang *geopolitical backlash cost* tinggi (Zhang, 2018). Konsep *Cost Balancing Theory*, dengan kata lain, menjelaskan bahwa, kebijakan penggunaan koersi dapat menjadi pilihan yang relevan bagi suatu negara, ketika kebutuhan pembangunan reputasi atas penyelesaian isu tinggi dan pengaruh kerugian ekonomi rendah. Kemudian, ketika peluang terjadinya reaksi geopolitik tinggi, pilihan bentuk instrumen koersi yang paling sesuai untuk menghindari eskalasi perang terbuka adalah dengan instrumen koersi non-militer (Zhang, 2018).

1. 5. 2. Alasan Rasional dan Taktik Strategis Koersi Tiongkok

Terlepas dari tokoh pemimpin nasionalnya, Tiongkok secara konsisten selalu melakukan praktik penggunaan koersif dengan taktik dan alasan yang sama, menunjukkan adanya kesinambungan dalam tindakannya. Zhang (2019) menyebutkan, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan mengenai alasan dan taktik koersi Tiongkok. Pertama, sanksi Tiongkok, pada umumnya bersifat simbolis dan berfungsi sebagai suatu isyarat (*a signaling device*). Tiongkok, dalam

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

mengambil tindakan koersi tidak sepenuhnya untuk melemahkan lawan secara ekonomi, tetapi juga akan menggunakan *tools* yang berdampak lebih efektif, seperti menyerang identitas nasional atau menyasar aspek psikologis negara target (Zhang, 2019; Lee, 2017) agar negara target tersebut terdorong untuk mengubah perilaku atau kebijakannya.

Kedua, Tiongkok selektif dalam memilih bidang sasaran dan tindakan sanksi yang diberlakukan. Sanksi ekonomi Tiongkok cenderung ‘kecil’ dan terfokus pada sektor-sektor yang tidak merugikan bagi perekonomiannya. Tiongkok bertindak penuh perhitungan dalam memilih bisnis apa yang akan dikoersikan dan tidak akan menjatuhkan sanksi pada bidang-bidang yang mendominasi ekonomi nasionalnya. Dengan demikian, Tiongkok akan bersikap selektif dalam menjalankan tindakan sanksi ekonomi untuk menghindari risiko kerugian ekonomi negara, terutama ketika Tiongkok bergantung pada negara target tersebut dalam sektor tertentu. Karena alasan ini, Tiongkok cenderung menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang lebih kecil dari dirinya (Zhang, 2019).

Ketiga, sanksi ekonomi Tiongkok cenderung berfokus pada sektor bisnis perusahaan besar baik milik negara atau swasta di negara target (Zhang, 2019). Ketika perusahaan-perusahaan besar tersebut terdampak dari sanksi ekonomi yang berlaku, mereka akan mengalami kesulitan dalam beroperasi. Jika bisnis mereka terhambat, upaya yang dapat mereka lakukan adalah menekan pemerintah negaranya untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Hal ini kemudian selaras dengan penjelasan Rudolf (2007) tentang dua model dasar dari hubungan kausal antara dampak ekonomi dan perilaku politik, salah satunya adalah model

mikro dari pluralitas kepentingan. Tujuan pemberlakuan sanksi tidak menargetkan kelompok elit pemerintah negara targetnya secara langsung, tetapi, terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan negara target. Mereka adalah kelompok-kelompok yang kepentingannya tidak terkait dengan kebijakan yang sedang dikenai sanksi, namun justru mereka yang paling dirugikan.

Dengan demikian, melalui penjabaran keseluruhan kerangka berpikir di atas, penulis menjelaskan alasan penggunaan koersi sebagai respon kebijakan luar negeri oleh Tiongkok atas isu THAAD dengan *framework Cost Balancing Theory*, kemudian menjelaskan alasan tindakan pelarangan kultur Korea Selatan sebagai pilihan bentuk instrumen sanksi ekonomi melalui tiga poin Alasan rasional dan Taktik Strategis dalam praktik koersi Tiongkok.

1. 6. Hipotesis

Tiongkok menerapkan pelarangan produk kultur Korea Selatan sebagai respon kebijakan ditempatkannya THAAD karena dua alasan. Pertama, larangan produk kultur merupakan bentuk koersi yang memberikan *benefit* yang tinggi dan *economic vulnerability cost* yang rendah bagi Tiongkok. Kedua, bentuk koersi non-militer yang dipilih dengan mempertimbangkan tingginya peluang kemungkinan terjadinya *geopolitical backlash*.

1. 7. Metodologi Penelitian

1. 7. 1. Definisi Konsep & Operasionalisasi

1. 7. 1. 1. Coercion

Coercion (koersi) atau paksaan/tekanan menurut Oxford Languages adalah perilaku membujuk seseorang atau suatu pihak untuk melakukan sesuatu melalui penggunaan ancaman atau kekerasan. Zhang (2017) sendiri mendefinisikan *coercion* sebagai penggunaan tindakan negatif (atau ancaman) melalui *statecraft* sebagai upaya untuk menuntut perubahan perilaku negara tertarget, melalui tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit bagi negara target. *Statecraft* merupakan alat-alat kenegaraan, yakni seperti kekuatan atau kekuasaan, di mana sarana ini kemudian dipergunakan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk mengejar tujuan dari suatu kebijakan luar negerinya (Baldwin, 1985; Freeman, 1997).

Tujuan suatu negara melangsungkan koersi secara umum adalah mengharapkan agar negara lawan atau negara target untuk mengubah perilaku atau kebijakannya atas suatu masalah (Zhang, 2017; Pape, 1992). Pieper (dalam BBC, 2020) menyatakan, dalam interaksinya dengan negara lain, negara terkadang memberikan sanksi baik secara unilateral maupun multilateral. Ketika suatu negara yang menjatuhkan sanksi kepada negara lain, hal ini mengindikasikan bahwa negara yang menjatuhkan sanksi, mengharapkan adanya perubahan perilaku dari negara yang dijatuhi sanksi tersebut. Rudolf (2007) juga menyebutkan, sanksi berarti menanggihkan interaksi normal antara negara di wilayah tertentu yang dalam konteks interaksi ini, bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu di

sisi negara target. Bentuk instrumen atau *tools* dari koersi sebagai kebijakan luar negeri sendiri beragam.

Zhang (2018) mengategorikannya menjadi dua macam berdasarkan karakteristiknya, yakni koersi non-militer dan koersi militer. Koersi non-militer meliputi sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan *grey-area administrative coercion*, sedangkan koersi militer merupakan bentuk tekanan yang paling mengarah pada terjadinya eskalasi perang antar negara, penggunaannya melibatkan instrumen alat-alat militer (Zhang, 2018; Pape, 1992).

1. 7. 1. 2. Pelarangan Produk Kultur

Pelarangan dalam konteks penelitian ini merujuk pada bentuk kebijakan ekonomi bersifat negatif yakni sanksi ekonomi. Baldwin (1985) menggolongkan bentuk instrumen ekonomi dalam kebijakan luar negeri dalam dua macam bentuk kebijakan, yakni yang bersifat positif dan negatif. Kedua yakni kebijakan-kebijakan ekonomi bersifat negatif yang cenderung bersifat koersif atau berupa paksaan, seperti kebijakan pembatasan ekspor atau embargo, kebijakan pembatasan impor atau larangan, masuknya hubungan perdagangan ke dalam daftar hitam (*blacklist*), *preclusive buying* atau pembelian yang dimaksudkan untuk menjauhkan barang dari tangan negara target, kebijakan perpajakan yang menghukum (*punitive taxation*), penangguhan bantuan, dan pembekuan aset. Hal ini kemudian menjadikan instrumen ekonomi dalam kebijakan luar negeri yang bersifat negatif cenderung berupa hambatan dengan upaya untuk mengancam atau menghukum (Baldwin, 1985).

Produk kultur Korea Selatan dalam konteks ini mengacu pada produk-produk asal Korea Selatan yang masuk dalam konsep fenomena gelombang budaya Korea Selatan atau yang dikenal pula sebagai *Hallyu* atau *Korean Wave*. Istilah *Hallyu* pertama kali muncul, mengacu pada kegilaan global terhadap budaya Korea Selatan. *Korean Wave* membangun fondasi yang kuat melalui budaya populer seperti drama TV dan musik, telah mendorong batas pengaruhnya sejak tahun 2010-an. Karena pesona budaya yang unik, Korea Selatan dikenal luas oleh orang-orang di seluruh dunia melalui platform online global seperti YouTube dan layanan jejaring sosial, yang kemudian menjadikan konsep istilah ini meluas ke budaya, makanan, sastra, dan bahasa tradisional Korea (Korea.net, 2020).

Pelarangan produk kultur dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan Tiongkok untuk melarang berbagai macam budaya Korea Selatan yang meliputi musik Kpop, konser, film, drama, acara televisi, dan produk budaya Korea Selatan lain seperti kosmetik dan *fashion*.

1. 7. 1. 3. *Benefit yang Tinggi*

Istilah *benefit* dalam konteks ini merujuk pada konsep *core benefit* dari *Cost Balancing Theory* Ketian Zhang (2018), yakni *the need to establish a reputation for resolve* atau urgensi untuk membangun reputasi sebagai wujud keseriusan. Dua indikator yang mengukur kebutuhan suatu negara untuk membangun reputasi dalam suatu isu atau konflik sebagai wujud keseriusannya adalah visibilitas atau tereksposnya dan menonjolnya suatu kasus. Tingginya urgensi kebutuhan untuk membangun reputasi sebagai wujud keseriusan secara objektif

dapat diamati melalui menonjolnya dan melimpahnya publisitas kasus, yang mana hal ini dapat dilihat melalui bagaimana kasus tersebut banyak diliput oleh media-media internasional yang berpengaruh. Ketika kasus tersebut menarik perhatian dan mendapatkan liputan yang tinggi, maka tindakan atau aksi negara yang bersangkutan juga akan menjadi perhatian. Hal ini dapat menunjukkan keseriusan negara untuk mengambil tindakan atas isu serupa bagi negara-negara lain. Kedua, melalui *speech evidence*, yakni yang meliputi pernyataan resmi otoritas negara atau para ahli yang meliputi tiga hal, pernyataan yang menunjukkan kekhawatiran akan dipandang lemah oleh negara lain, pernyataan yang menyatakan pentingnya bagi mereka untuk membela hak kedaulatan negaranya, dan menunjukkan bahwa tindakan negara lawan merupakan teladan yang buruk (Zhang, 2018).

1. 7. 1. 4. Economic Vulnerability Cost yang Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya risiko kerugian ekonomi meliputi dua hal hubungan ekonomi bilateral negara penarget dengan negara target dan hubungan ekonomi multilateral negara penarget dengan kawasan negara target secara umum. Risiko kerugian ekonomi dikatakan rendah ketika data objektif ekonomi menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara negara penarget dan target asimetris, dimana negara penarget memiliki kekuatan ekonomi lebih besar atau lebih menguntungkan daripada negara target. Hal ini dapat dilihat melalui *trade dependency* kedua negara. Kedua, pernyataan analis kebijakan pemerintah, otoritas negara, dan *semi-official* yang menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan antara negara target terhadap negara penarget (Zhang, 2018).

1. 7. 1. 5. Tingginya Peluang Terjadinya *Geopolitical Backlash*

Berdasarkan konsep *Cost Balancing Theory* yang dijabarkan oleh Ketian Zhang (2018), jika potensi terjadinya *geopolitical backlash* adalah tinggi, maka negara akan cenderung memilih bentuk koersi non-militer sebagai pilihan koersinya. Indikator yang mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya *geopolitical backlash* adalah kapabilitas negara target untuk menyeimbangi negara penarget. Peluang terjadinya *geopolitical backlash* dapat dikatakan tinggi ketika terdapat analisa oleh otoritas resmi tentang potensi hubungan bilateral negara target dengan negara aliansinya. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan dan perilaku negara target di masa lampau hingga saat ini dalam menghadapi krisis. Adanya pernyataan resmi otoritas negara atau *semi-official* serta analisis yang mengindikasikan adanya peningkatan kehadiran negara aliansi target, serta pernyataan yang menyampaikan kekhawatiran tentang adanya kepentingan dan tujuan yang lebih besar dari negara aliansi target di kawasan negara target (Zhang, 2018).

1. 7. 1. 6. Budaya sebagai Komoditas Ekonomi

Budaya dapat menjadi sebuah produk yang menghasilkan nilai ekonomi. Komodifikasi menggambarkan proses di mana sesuatu hal tanpa nilai ekonomi, kemudian mendapatkan nilai ekonomi yang dapat menggantikan nilai sosial lainnya. Proses tersebut mengubah hubungan yang sebelumnya tidak berkaitan dalam perdagangan, ke dalam hubungan yang pada dasarnya menjadi komersial dalam penggunaan sehari-hari (Levesque, 2015). Komodifikasi suatu barang dapat dikatakan efektif apabila bentuk komoditas tersebut dapat memenuhi permintaan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pasar. Komoditas diproduksi dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagaimana penggunaan komoditas tersebut (Fithratullah, 2018). Ketika budaya dapat menjadi sebuah entitas yang bersifat komersial, memiliki pasar, dan bernilai ekonomi, maka dengan demikian dapat dikatakan sebagai suatu komoditas.

Istilah komoditas sendiri diartikan sebagai suatu barang ataupun produk yang dapat diperdagangkan, dibeli, atau dijual (Cambridge Dictionary, t.t), dan memiliki ciri spesifik bahwa dirinya merupakan suatu barang yang memiliki nilai jual di pasar, memberikan nilai guna serta nilai tukar bagi pembelinya, serta bagi penjualnya hanya sebagai nilai tukar yakni murni menghasilkan uang (Patnaik, 2015). Meskipun secara umum dalam penggunaannya komoditas sering merujuk pada bahan agrikultur seperti beras serta berbagai bahan pangan lainnya, namun pada dasarnya, semua bentuk produk atau barang yang menjual dan bernilai ekonomi dapat dikatakan sebagai komoditas, termasuk dengan budaya. Terlebih dengan adanya perkembangan globalisasi, manusia di era modern kemudian terdorong untuk terus berinovasi terutama pada hal-hal yang dapat menghasilkan nilai jual yang *profitable* terlebih dalam pasar yang lebih luas, melibatkan meningkatnya pengaruh arus modal, orang, tempat dan budaya menjadi obyektif untuk tujuan pasar global (Kuršaitė, 2004).

1. 7. 1. 7. Nilai Ekonomi Tinggi

Nilai ekonomi adalah pengukuran manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa untuk individu atau perusahaan. Nilai ekonomi juga bisa menjadi harga maksimum atau jumlah uang yang bersedia dibayarkan seseorang untuk suatu barang atau jasa. Nilai ekonomi tidak memiliki ukuran pasti dalam formula perhitungannya, karena yang menjadi pertimbangan dalam tolak ukur nilai ekonomi adalah pandangan konsumen akan produk dan fungsi secara keseluruhan (Investopedia, 2019). Sehingga, ketika konsumen memutuskan untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu barang atau jasa daripada harga pasar, maka nilai ekonomi dari barang atau jasa tersebut termasuk tinggi (Investopedia, 2019). Nilai ekonomi tinggi dalam skripsi ini merujuk pada pasar Tiongkok yang dilihat sebagai salah satu pasar terbesar untuk produk kultur Korea Selatan. Oleh karenanya, pasar Tiongkok memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi Korea Selatan mengingat ekspor industri kultur dan konten Korea Selatan yang menempati urutan pertama dengan persentase mencapai 0,097% per GDP dari total keseluruhan ekspor industri yakni sebesar 0,38 % dari GDP Korea Selatan di tahun 2015 (CEIC, t.t).

1. 7. 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan koleksi perpustakaan berupa bahan cetak seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan berbagai jenis dokumen dan laporan cetak serta berupa bahan atau karya non cetak seperti rekaman audio berupa kaset, vid-

eo film, dan barang elektronik lainnya (Zed, 2004). Sumber dari data pustaka yang dikumpulkan merupakan sumber sekunder yang artinya sumber bukan merupakan data orisinil yang didapatkan penulis secara langsung dari lapangan, melainkan data yang berasal dari tangan kedua atau dari pihak lain (Zed, 2004). Data-data yang dikumpulkan merupakan data-data yang telah ada sebelumnya dan merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya oleh orang lain (Kothari, 2004). Data-data yang kemudian penulis kumpulkan merupakan data-data yang berkaitan dengan pelarangan kultur budaya Korea Selatan oleh Tiongkok atas penempatan THAAD.

I. 7. 3. Teknik Analisis Data

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk kualitatif dengan melibatkan pemeriksaan silang berbagai sumber data dan prosedur pengumpulan untuk mengevaluasi sejauh mana semua bukti terkonvergensi (Suter, 2012). Melalui metode analisis data kualitatif, teknik analisis dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara lebih rinci, baik dengan memfokuskan pada kasus dan keterkaitan antara variabel-variabel khusus di dalamnya atau dengan cara membandingkan beberapa kasus, kemudian mencari keterkaitan baik persamaan dan perbedaan diantaranya. Tujuan dari teknik analisis data kualitatif ini adalah untuk mencapai pernyataan yang dapat digeneralisasikan dengan mem-

bandingkan berbagai data berupa dokumen atau berbagai teks atau beberapa kasus (Flick, 2013).

1. 7. 4. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian memfokuskan kebijakan Tiongkok atas Korea Selatan pada hambatan non-tarif yakni berupa pelarangan secara spesifik di sektor kultur Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pelarangan yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Korea Selatan atas keputusan penempatan THAAD ini mencakup sektor ekonomi lain yakni komoditas perusahaan manufaktur otomotif, seperti KIA dan Hyundai, hingga perusahaan *hypermarket* yakni Lotte. Sehingga pembahasan yang hanya berfokus pada pelarangan di sektor kultur atau budaya Korea Selatan menjadi batasan agar pembahasan penelitian dapat lebih komprehensif.

Peneliti juga membatasi jangkauan waktu penelitian, dimulai pada Februari 2016, yakni ketika Pemerintah Tiongkok menyatakan secara tegas penentangannya atas dilaksanakannya pertemuan perundingan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terkait penempatan THAAD. Di tahun yang sama pula, kebijakan pelarangan akan kultur Korea Selatan mulai diberlangsungkan oleh Tiongkok. Oktober 2017 menjadi batas akhir penelitian, dikarenakan pada tahun ini, Tiongkok telah mencabut kebijakan pelarangan kultural terhadap Korea Selatan, ditandai dengan diberikannya izin kepada artis Korea Selatan yakni Mamamoo untuk tampil disebuah acara televisi Tiongkok (Hong, 2017). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memasukkan data-data

dari peristiwa-peristiwa di luar jangkauan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. 7. 5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. BAB I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan metodologi penelitian. BAB II menjabarkan terkait kronologi THAAD serta respon Tiongkok atas isu tersebut. BAB III menjelaskan pertimbangan tinggi-rendahnya *benefit* dan *cost* keputusan Tiongkok dalam memberlakukan penggunaan koersi berupa pelarangan kultur Korea Selatan sebagai respon atas THAAD. BAB IV menjelaskan pertimbangan peluang terjadinya *geopolitical backlash* dari Korea Selatan sebagai alasan Tiongkok untuk memberlakukan penggunaan koersi non-militer. BAB V merupakan kesimpulan.